



# Sembilan Sumber PAD Tak Penuhi Target

Gianyar (Bali Post) -

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar tahun 2017 secara umum sudah melampaui target. Namun, jika dirinci per item sumber pendapatan, ada sembilan item yang tidak terpenuhi. Nilainya cukup besar, yakni puluhan miliar rupiah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar I Wayan Ardana, Kamis (26/4) kemarin menerangkan, PAD Gianyar pada 2017 dibagi menjadi empat hal. Pertama, dari Pendapatan Pajak Daerah yang terdiri dari delapan item pajak dan satu bea. Kedua, dari Pendapatan Retribusi Daerah yang terdiri dari 14 item retribusi. Selain itu, ada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain.

PAD yang Sah terdiri dari tujuh item. Ardana pun mengakui, dari sekian item itu ada sembilan item yang tidak bisa memenuhi target

realisasi. Pada Pajak Daerah yang tidak memenuhi target di antaranya Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. "Nah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan ini yang paling tidak memenuhi target. Dari target Rp 50 miliar, yang terrealisasi hanya Rp 16 miliar lebih. Sisanya sekitar Rp 33 miliar lebih, tidak bisa terpenuhi," katanya.

Dia menerangkan, ada beberapa hal yang membuat target tidak mampu direalisasikan. Salah satu faktor adanya beberapa pajak masuk di pos piutang. "Jadi kelihatan

tagihannya besar. Itu terjadi karena aset semu. Misalnya ada tanah di Desa Lebih yang kena abrasi, masuk di tagihan," jelasnya.

Hal lain, tanah *pakarangan* desa yang mulai tidak dipungut pajak, sehingga timbul piutang semu. "Yang tidak memenuhi target itu sudah ditutupi dengan pajak lainnya. Sehingga secara keseluruhan pendapatan Pajak Daerah kami melampaui target Rp 18 miliar," ujar Ardana.

Sementara pada pendapatan retribusi, ada dua item yang tidak terpenuhi. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, target tidak terpenuhi sampai Rp 5 miliar lebih dari target

Rp 13 miliar lebih. Kemudian, Retribusi Izin Gangguan tidak terpenuhi Rp 800 juta lebih. "Secara keseluruhan pun pendapatan Retribusi Daerah ini minus dari target mencapai Rp 1,3 miliar lebih," jelasnya.

Karena target tidak tercapai, maka tahun ini BPKAD memilih bekerja aman. Caranya, menurunkan target pendapatan. "Tadinya dipatok sekian tahun turun. Misalnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan itu akan diturunkan targetnya tahun ini, dari sebelumnya Rp 50 miliar menjadi Rp 30 miliar," ungkapny.

Lantaran target diturunkan, pihaknya pun optimistis bisa meraup pendapatan sesuai target. "Untuk tahun ini, kalau dihitung dari periode, kami yakin bisa memenuhi target," tegas Ardana. (kmb35)

Edisi : 27 April 2018

Hal : 9